

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan masih ada ketidaksesuaian dan penyimpangan dalam penyajian LKPD karena kapasitas sumber daya manusia pemerintah daerah belum memadai (Indriasari dan Ertambang, 2008). Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dapat dilihat dari kemampuan SDM dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai jabatan masing-masing.

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pengelola keuangan daerah untuk meningkatkan kompetensi SDM. Sumber daya manusia yang berkompeten diharapkan mampu menghasilkan laporan keuangan sesuai SAP yang telah ditetapkan pemerintah (Sukmaningrum dan Puji, 2012). Perubahan peraturan perundangan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah berdampak pada teknis operasional pelaporan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah bertujuan memberikan informasi kepadamasyarakat atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Informasi bermanfaat untuk pengambilan keputusan dan menentukan kebijakan publik (Mardiasmo, 2006). Kriteria informasi

laporan keuangan pemerintah daerah harus mengandung nilai keterandalan dan ketepatanwaktuan.

Teknis operasional pelaporan keuangan daerah meliputi sistem akuntansi, prosedur pencatatan, dokumen dan formulir yang digunakan, laporan serta pengawasan. Kapasitas sumber daya manusia yang memadai dengan latarbelakang pendidikan akuntansi menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan peraturan perundangan yang telah ditetapkan pemerintah. Sumber daya manusia yang memadai dan berkualitas akan menghasilkan keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah (Sari dan Banu, 2014).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bertujuan memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keterandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. Sistem pengendalian intern atas pengelolaan informasi diselenggarakan secara menyeluruh oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mencapai tata pemerintahan yang baik (Yendrawati, 2013).

Faktor pertama yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah adalah kapasitas sumber daya manusia yang memadai. Terbatasnya pegawai pemerintah yang berlatar belakang pendidikan bidang akuntansi menjadikan kurangnya pemahaman atau

penguasaan aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mengelola keuangan daerah dengan baik dan benar yang mengakibatkan pemborosan bahan, waktu dan tenaga. Oleh karena itu untuk dapat melaksanakan tanggungjawab dan menghasilkan laporan keuangan yang memenuhi karakteristik keterandalan, maka kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi sangatlah penting (Karmila, Tanjung dan Darlis, 2014).

Faktor kedua yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Kapasitas sumber daya manusia yang memadai belum tentu bisa menghasilkan laporan keuangan yang andal jika tidak didukung dengan teknologi informasi. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik, selain itu dengan menggunakan teknologi informasi salah satunya komputer dalam menghitung dan menyusun laporan keuangan akan lebih cepat, akurat dan konsisten dari pada sistem manual (Indriasari dan Nahartyo, 2008).

Faktor ketiga yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah adalah pengendalian intern akuntansi. penyusunan laporan keuangan tentu saja sering terjadi kesalahan baik

disengaja maupun tidak disengaja, oleh karena itu untuk meyakinkan *stakeholder* maupun publik mengenai keakuratan laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah dibutuhkan sistem pengendalian intern yang optimal. Sebuah sistem pengendalian intern tidak dimaksudkan untuk meniadakan semua peluang terjadinya kesalahan atau penyelewengan, akan tetapi sebuah sistem pengendalian intern yang baik dapat menekan terjadinya kesalahan dan penyelewengan dalam batas-batas yang dapat dianggap layak, serta seandainya hal tersebut terjadi maka akan segera dapat diketahui dan diatasi (Purwono, 2007:120).

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu Indriasari dan Ertambang (2008); Sukmaningrum dan Puji (2012); Yendrawati (2013) dan; Sari dan Banu (2014) yang menunjukkan hasil tidak konsisten. Penelitian Indriasari dan Ertambang (2008) menunjukkan kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap keterandalan namun berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian Sukmaningrum dan Puji (2012) menunjukkan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan

pemerintah daerah. Penelitian Yendrawati (2013) menunjukkan kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan dan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Penelitian Sari dan Banu (2014) menunjukkan sumber daya manusia dan pengendalian internal berpengaruh terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan daerah.

Penelitian ini termotivasi oleh penelitian-penelitian terdahulu dan ingin mengkonfirmasi hasil-hasil penelitian tersebut yang masih memberikan hasil yang beragam. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Akuntansi Pemerintah Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Timor Tengah Selatan (Studi Kasus Pada Badan Kepegawaian Daerah)”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi pokok permasalahan adalah Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Akuntansi Pemerintah Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Timor Tengah Selatan (Studi Kasus Pada Badan Kepegawaian Daerah)

### **1.3. Persoalan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka yang menjadi persoalan penelitian ini adalah:

- a Apakah Kapasitas Sumber Daya Manusia Berpengaruh Terhadap Keberhasilan Pelaksanaan Akuntansi Pemerintah Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Timor Tengah Selatan
- b Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Terhadap Keberhasilan Pelaksanaan Akuntansi Pemerintah Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Timor Tengah Selatan
- c Apakah Pengendalian Intern Akuntansi Berpengaruh Terhadap Keberhasilan Pelaksanaan Akuntansi Pemerintah Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Timor Tengah Selatan

### **1.4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

- a Tujuan Penelitian
  1. Untuk Membuktikan Pengaruh Intern Akuntansi Berpengaruh Terhadap Keberhasilan Pelaksanaan Akuntansi Pemerintah Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Timor Tengah Selatan
  2. Untuk Membuktikan Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keberhasilan Pelaksanaan Akuntansi Pemerintah Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Timor Tengah Selatan

3. Untuk Membuktikan Pengaruh Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keberhasilan Pelaksanaan Akuntansi Pemerintah Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Timor Tengah Selatan

b Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi serta menambah literatur tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Akuntansi Pemerintah Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Timor Tengah Selatan (Studi Kasus Pada Badan Kepegawaian Daerah)